Halaman

Kejaksaan Tetapkan Kepala BPN Sumut Tersangka.....

Dari Halaman 1

persetujuan penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

'Tanpa dipenuhinya kewajiban oleh PT. NDP menyerahkan paling sedikit 20 % lahan HGU yang diubah menjadi HGB karena Revisi Tata Ruang kepada negara dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT. DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menja-

di HGB tersebut yang mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 % dari seluruh luas HGU yang diubah menjadi HGB karena Revisi Tata Ruang yang diperkirakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang saat ini sedang dilakukan proses audit dan perhitungannya,"

Disampaikannya, dari hasil penyidikan serta berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi kemudian terhadap para tersangka dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terkait apakah akan ada keterlibatan orang lain atau pihak lainnya, kita tunggu hasil pengembangan penyidikannya, nanti akan kita sampaikan informasinya," pungkasnya.(A-08)

Marak Dugaan Penyelewengan Anggaran di PLN

Dari Halaman 1

PLN (Persero) di bawah duet kepemimpinan mantan Deputi I dan Deputi II KSP era Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Darmawan Prasodjo alias Darmo yang hingga kini masih awet menduduki jabatan Direktur Utama dan Yusuf Didi Setiarto, Direktur LHC yang diisukan juga berambisi menduduki posisi Dirut PLN jika Darmo lengser.

Salah satu modus menghamburkan uang negara yang lagi trend di PLN buah kreasi kedua pejabat strategis di PLN itu adalah menggelar kegiatan Marathon.

Ironisnya, tak peduli negeri sedang gonjang ganjing akibat gelombang protes yang berakhir anarkis hingga menewaskan sejumlah orang pada Agustus 2025 lalu, PLN sebagai sponsor utama kegiatan Marathon.

Menurut informasi, kegiatan tersebut merupakan inisiasi Yusuf Didi Setiarto selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI). Benang merahnya sangat kentara, karena kegiatan bertajuk Justicia Marathon 2025 itu selain digelar oleh Iluni yang dipimpinnya, sponsor utamanya adalah PLN

Meski urung dilaksanakan pada akhir Agustus lalu karena alasan kondisi keamanan, namun kegiatan yang menelan biaya PLN hingga miliaran rupiah itu, akhirnya tetap dilaksanakan pada 5 Oktober 2025 lalu di komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta yang notabene merupakan rumah rakyat dalam menyampaikan aspirasi, bukan tempat event hura-hura.

Menurut berita sebelumnya, memang sejak pencalonannya sebagai ketua ILUNI FHUI,

Yusuf Didi terus menerus menggelontorkan anggaran PLN dalam jumlah jumbo untuk kampanyenya. Tujuannya jelas, agar menarik dukungan dirinya agar dianggap totalitas dalam membesarkan ikatan alumni

"Padahal, dengan uang miliaran tersebut dapat digunakan untuk melistriki bagi masyarakat indonesia yang belum menikmati listrik. Hal ini jelas pastinya dapat memicu conflict of interest dan pertanyaannya, apa feedback yang diperoleh PLN dari kegiatan itu?. Semestinya miliaran rupiah tersebut lebih untuk kebutuhan masyarakat luas," ungkap Ketua Umum IWO sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira belum lama ini.

Di samping itu, penyimpangan uang negara lainnya yang diduga melibatkan Yusuf Didi secara langsung adalah penggunaan jasa pendampingan hukum eksternal yang dimonopoli alumni Fakultas Hukum dari kampus 'Yellow Jacket".

"Kalau itu sudah menjadi rahasia umum. Karena hampir semua pendampingan hukum kalau boleh dibilang diserahkan semuanya ke alumni FHUI. Malah budgetnya sampai puluhan miliar," sebut sumber di Direktorat Legal & Human Capital PLN yang langsung dibawah Yusuf Didi.

Lain Yusuf Didi, lain pula Darmawan Prasodjo. Dirut yang sudah menjabat selama 4 tahun ini, diduga kuat melakukan penyelewengan uang negara lewat perusahaan plat merah itu dengan modus yang lebih beragam.

Dugaan penyimpangan yang sudah mencuat ke permukaan dan sudah bergulir ke ranah hukum itu diantaranya mulai ribuan penghargaan berbayar, kontrak di divisi komunikasi yang dimonopoli perusahaan tertentu dugaan CSR yang digunkaan untuk kepentingan politik Pilpres dan tidak tepat sasaran serta menggilanya praktik nepotisme dengan mengatasnamakan profesional hire (prohire) karena yang direkrut rata-rata kerabatnya.

Terbaru dan indikasi penyimpangan yang paling mencolok adalah kasus sewa pembangkit dengan daya 3 Giga Watt (GW) senilai Rp50 triliun yang dilakukan PLN.

Untuk diketahui, proses sewa pembangkit yang sebelumnya tertutup rapat ini, mulai tersiar setelah proses sewa berlangsung selama 10 bulan. Kontrak atau sewa pembangkit itu dikabarkan berlangsung selama 5 tahun.

Ironisnya lagi, berdasarkan informasi, di balik sewa pembangkit itu, diduga kuat ada aliran 'fee' dengan nilai 'jumbo' dengan angka mencapai triliunan rupiah yang mengalir ke oknum tertentu di perusahaan plat merah tersebut.

Bahkan sama juga dengan Yusuf Didi, sejak 3 tahun terakhir, Darmawan Prasodjo sengaja menggelar Marathon bertajuk 'PLN Eletric Run' di lingkungan rumah mewahnya di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD).

Untuk perhelatan akbar PLN 'Electric Run' tersebut, ditaksir menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut. Dan anehnya, terendus tanpa tender, vendor yang mengerjakan hanya itu-itu untuk setiap tahun penyelenggaraannya.

'Karena itu, IWO dan Re-LUN terus mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejagung dan KPK untuk mengusut kasus ini. Kami juga berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini 'on fire' dalam memantau penggunaan uang negara, bisa memantau keuangan di PLN dan segera menghentikan setiap penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi," pungkas Yudhistira di Jakarta, Selasa (14/10/2025).(R/A-10)

105 Ribu Orang Daftar.....

Dari Halaman 1

nyebutkan, semua pendaftar itu nanti bisa memilih tiga bidang yang paling diminati dari lowongan magang yang dibuka perusahaan.

"Nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan," ujar Yassierli dalam konferensi pers di

Ia menyebutkan jumlah perusahaan yang saat ini sudah membuka lowongan ada sebanyak 1.147 perusahaan. Nantinya, jumlah ini dipastikan terus bertambah, begitu juga dengan jumlah pelamar.

Untuk pelamar yang sudah mendaftar program magang, nantinya proses akhir penerimaan akan dilakukan masing-masing perusahaan. Ia menekankan tak ada intervensi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Proses terakhir yang dilakukan perusahaan, kita sampaikan seleksi bukan dari Kemnaker tapi oleh perusahaan, berdasarkan data yang mereka miliki dan ini jadi dasar mereka," jelasnya.

Yassierli mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk bisa mendorong masing-masing perusahaan di wilayahnya agar ikut berpartisipasi dalam program magang ini.

'Program magang ini atas arahan presiden dan ternyata mendapat antusiasme tinggi baik dari adik-adik para fresh graduate baik sarjana, diploma dan juga antusiasme luar biasa dari perusahaan," pungkasnya.(cnni/js)

Pemerintah Upayakan

Dari Halaman 1

menaruh perhatian besar terhadap isu pemberian izin bangunan bagi pondok pesantren.

"Pak Presiden memberikan perhatian itu dan akan terus diusahakan agar gratis untuk pesantren," ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

PBG adalah izin yang diterbitkan pemerintah bagi pemilik bangunan atau perwakilannya. Sebelum penerbitan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021, dokumen

Cak Imin mengatakan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur bahwa ponpes merupakan unit

ren bisa ataupun berhak mendapatkan bantuan dari

"Sehingga sangat mungkin akan terjadi," ucap dia yang juga Ketua Umum PKB.

jadi sorotan menyusul ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.

ponpes di Indonesia yang mengantongi PBG. .(cnni/js)

Purbaya "Ogah' APBN Buat Family Office

Dari Halaman 1

Apalagi, kalau pembangunannya memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Purbaya mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Ia tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian family office di Indone-

"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) dikutip Detik

Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran

dan nggak ada yang bocor, itu saja," imbuhnya.

Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Selain itu, Purbaya mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan family office.

"Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," ujarnya.

Rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Mei 2024,.

Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.

Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US\$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US\$11,7 triliun.

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi

Sekitar akhir Juli lalu, Luhut memastikan rencana pembentukan family office tetap berjalan meski rezim pemerintahan telah berubah dari Jokowi ke Prabowo Subianto.

"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus Kita harap bisa segera diputuskan presiden," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7).

Ia bahkan menyebutkan family office ditargetkan bisa beroperasi di tahun ini juga.

"Ya kita harap tahun ini harus bisa," jelasnya. (cnni/js)

Badan Gizi Kembalikan Rp70 T

Dari Halaman 1

Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.

Namun, penyerapan dana di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi

Untuk tahun depan, alokasi anggaran BGN justru akan meningkat tajam. Dadan menyebut lembaganya akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai institusi dengan ang-

garan terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.

"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," kata Dadan.

Selain soal anggaran, Dadan menuturkan ada dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan. Mereka kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG di seluruh

"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya lewat APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan mekanisme tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih

kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG yang membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi lewat mekanisme tender.

Namun berkat partisipasi mitra, kini sudah ada 11.504 SPPG aktif berdiri di berbagai wilayah.

"Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," tambah

Hingga saat ini, ada 30 ribu mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG akan berdiri di wilayah aglomerasi dan 6.000 lainnya di daerah terpencil.(cnni/js)

Peta Genangan dan Drama Drainase Kota Medan

Dari Halaman 1

Labuhan, mengancam lebih dari genangan lokal

Titik merah itu bukan sekadar angka di peta. Mereka muncul dari data historis 2019, laporan media 2022, dan keluhan warga 2025 dimana seringnya banjir di lokasi yang sama. Bukankah bila genangan berulang di tempat yang sama, itu artinya

sistem telah gagal menyelesaikan akar masalah? Kolam retensi Martubung, USU, dan Medan Selayang muncul di peta sebagai ikon biru kecil bak monumen pembangunan yang konon jadi solusi besar. Namun kenyataannya, sebagian titik genangan berada jauh dari radius pengaruh kolam tersebut atau di area yang saluran airnya tak langsung terhubung. Kolam jadi "lampu hias", bukan

gardu pertahanan. Lebih ironis lagi, sebagian kolam retensi dibangun bukan karena hasil kajian hidrologi, tapi karena dorongan proyek dan target serapan anggaran. Drainase kota tak terhubung satu sama lain, peta sistem airnya pun tak pernah dibuka ke publik. Akibatnya, setiap kali hujan turun, air dari selatan menekan ke tengah kota tanpa arah keluar yang jelas. Banjir bukan karena curah hujan ekstrem, tapi karena sistem yang mati di atas kertas dan macet di

Sementara itu, di meja birokrasi, banjir disederhanakan jadi urusan pompa dan beton. Pemerintah lebih sibuk menimbun drainase dengan paving, membangun taman vertikal, dan menata trotoar kota yang cantik untuk difoto. Padahal, persoalan utamanya bukan keindahan kota, tapi kemampuan kota bernapas. Medan kehilangan ruang serap airnya. Lahan rawa, kebun, dan jalur resapan dijual menjadi kompleks perumahan dan ruko yang kini juga ikut kebanjiran.

Sungai-sungai besar seperti Deli, Belawan, Babura yang tampak di peta sebagai garis biru yang kian menyempit di banyak segmen. Sedimen, penyempitan, dan bangunan di tepi sungai membuat

jalur aliran makin terjepit. Air genangan mikro, yang semestinya lurus ke saluran, justru dipaksa belok ke jalan raya, gang, trotoar untuk mencari jalannya sendiri.

Lebih tragis, di area utara, rob dan genangan bersaing merasuk kota. Air laut pasang datang dari laut, hujan deras datang dari langit. Dan kolam retensi darat tak punya senjata untuk melawan rob. Dalam peta kita, rob jadi layer spesial yang mempositifkan bahwa ancaman banjir di Medan bukan hanya soal hujan lokal.

Karena itu peta ini berbicara: kalau intervensi tak ditempatkan di titik merah, kita hanya menggambar monumen-solusi kosong. Titik genangan tak butuh projek mewah, mereka butuh solusi tepat. Saluran yang lancar, kolam yang konektif, dan pengaturan ruang kota yang menghormati air, bukan menantangnya. Sebab air, sebagaimana rakyat, selalu mencari jalan pulang. Dan bila jalannya ditutup, ia akan menerobos ke mana pun ia bisa.(*)

tersebut bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

kegiatan lembaga masyarakat nirlaba. Atas dasar itu, Cak Imin berpendapat pondok pesant-

pemerintah.

Belakangan jumlah ponpes yang mengantongi PBG

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut hanya ada 50



Dari Halaman 1

Program magang sejatinya adalah jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menawarkan ruang belajar praktis bagi fresh graduate untuk memahami ritme industri. Namun, efektivitas program semacam ini selalu bergantung pada dua hal: kualitas pembinaan dan keberlanjutan kesempatan kerja setelah magang selesai. Tanpa dua hal itu, magang berisiko menjadi sekadar kegiatan seremonial yang tak meninggalkan jejak berarti bagi

Tujuan utama pemerintah jelas: menekan angka pengangguran terdidik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025 jumlah pengangguran dari kalangan sarjana masih mencapai sekitar 6,3 persen. Angka ini menggambarkan ketimpangan antara output pendidikan tinggi dan serapan tenaga kerja. Dalam konteks itu, kebijakan magang adalah langkah taktis yang patut diapresiasi. Namun, langkah taktis ini membutuhkan strategi jangka panjang yang lebih substansial.

Kita perlu memastikan bahwa magang bukan hanya soal menempatkan lulusan di meja kerja, tetapi juga mengasah employability skills keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Empat keterampilan abad ke-21 ini adalah fondasi agar para lulusan dapat beradaptasi di dunia kerja yang makin kompetitif. Di titik inilah peran dunia industri menjadi sangat penting: membimbing peserta bukan hanya dalam rutinitas teknis, tetapi dalam etos dan inovasi kerja.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program ini. Mekanisme perekrutan perusahaan mitra, sistem seleksi peserta, serta distribusi kuota antar daerah harus dilakukan secara terbuka. Jangan sampai program magang ini tersandera oleh praktik nepotisme atau dominasi korporasi besar di kota-kota besar saja. Lulusan dari daerah, termasuk dari perguruan tinggi Islam negeri di luar Jawa seperti UIN Sumatera Utara, seharusnya mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Selain itu, penting pula memastikan output program magang berdampak nyata bagi peserta. Pemerintah perlu menyiapkan sistem evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana peserta magang benar-benar mendapatkan peningkatan keterampilan, jaringan profesional, dan peluang kerja lanjutan. Tanpa indikator yang jelas, keberhasilan program ini hanya akan diukur dari angka partisipasi, bukan dari kualitas hasilnya.

Terakhir, perlu diingat bahwa magang hanyalah satu bagian kecil dari ekosistem ketenagakerjaan. Tantangan utama Indonesia tetap terletak pada peningkatan kualitas pendidikan vokasional, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, serta insentif bagi perusahaan yang membuka peluang kerja bagi lulusan muda. Dengan kata lain, magang nasional harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan ekonomi secara menyeluruh.

Kebijakan magang nasional patut disambut sebagai inisiatif progresif. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada gagasan "memberi kesempatan kerja sementara." Yang jauh lebih penting adalah menciptakan generasi muda yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja jangka panjang, tidak hanya menjadi penonton dalam pasar tenaga kerja yang terus berubah. Di sinilah tantangan kebijakan ini diuji apakah ia akan menjadi tonggak pembaruan, atau sekadar proyek politik sesaat.